

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu yang menjadikan manusia sebagai makhluk sosial adalah manusia mampu menerapkan komunikasi secara baik. Tujuan dari berkomunikasi pada dasarnya, untuk mengutarakan maksud seseorang kepada orang lain. Penting sekali menerapkan komunikasi yang baik dalam kehidupan politik, salah satunya yaitu memahami konteks berpolitik itu sendiri. Hal ini dilakukan dengan strategi komunikasi politik yang baik untuk menjelaskan kepada khalayak.

Media dalam sebuah komunikasi politik mempunyai peranan yang sangat penting. Media digunakan sebagai publisitas politik kepada masyarakat luas, tentunya dengan tujuan khalayak mengetahui agenda politik setelah itu simpati dan menjatuhkan pilihannya kepada partai tersebut. Siapapun komunikator atau aktivis politik akan berusaha untuk menguasai media, barang siapa yang telah menguasai media maka dia hampir memenangi pertarungan politik. Semenjak kemajuan teknologi dan informasi yang revolusioner, media cetak maupun elektronik mengantarkan informasi kepada khalayak dengan sangat efektif.

Di era global saat ini perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sudah mengalami perkembangan yang begitu pesat melalui globalisasi teknologi yang tanpa disadari sudah mempengaruhi setiap aspek kehidupan manusia. Globalisasi membawa tantangan bagi setiap individu agar tidak mudah terbawa

arus globalisasi, sehingga mampu memanfaatkan setiap aspek globalisasi demi kepentingan bersama.

Globalisasi teknologi telah membawa paradigma baru dalam komunikasi, ditandai dengan pesatnya penggunaan gawai sebagai media komunikasi. Melalui kecanggihan teknologi gawai seperti *smartphone*, komputer, *tablet*, *e-reader*, dan *laptop* semakin berkembang seiring dengan meningkatnya kebutuhan manusia akan media yang modern dan praktis. Gawai telah menjadi bagian yang paling mendominasi kehidupan sosial masyarakat, dengan penggunaan gawai yang telah merambah berbagai aspek seperti media komunikasi dan informasi, transaksi jual beli, fotografi, musik dan berbagai aspek lainnya. Sebagai upaya untuk mengatasi hal ini maka setiap individu atau warga negara harus memiliki keterampilan yang cukup untuk dapat mengendalikan arus globalisasi teknologi yang begitu dahsyat.

Tren gawai tidak hanya populer pada kalangan atas saja, namun sudah menjadi tren untuk semua kalangan bahkan dari usia anak-anak hingga dewasa. Gawai adalah barang canggih dan modern yang diciptakan dan dibuat dengan berbagai aplikasi yang dapat menyajikan berbagai media berita, jejaring sosial, hobi, informasi bahkan hiburan. Munculnya jejaring sosial ini juga telah merambah ke dalam kehidupan sosial-politik. Pada tingkat tertentu media jejaring sosial menjadi kekuatan sosial yang tak boleh diabaikan, karena dapat dengan mudah mempengaruhi persepsi individu tentang pandangannya terhadap sebuah permasalahan.

Melalui akun-akun pribadi atau anonim, banyak pengguna jejaring sosial yang ikut menyampaikan dan mengkritisi berbagai fenomena sosial, mengomentari pejabat-pejabat yang kurang mereka sukai, ikut serta mengontrol kebijakan-kebijakan publik dan menggalang opini publik untuk membela kepentingan individu atau kelompok tertentu. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Exstrom dan Shehata (2018 : 756) di Swedia bahwa interaksi sosial di media sosial memiliki efek yang jelas pada keterlibatan politik secara daring (dalam jaringan) di luar sosialisasi dan motivasi yang dilakukan melalui media tradisional. Temuannya menunjukkan bahwa mayoritas interaksi sosial kaum muda yang dilakukan secara daring digunakan untuk mencari informasi politik, hal ini menepiskan pendapat tentang kekhawatiran terjadinya penurunan partisipasi politik karena aktivitas serta interaksi daring yang dilakukan kaum muda di Swedia.

Gawai sebagai media komunikasi politik telah menjadi kekuatan publik yang sangat besar, karena keberadaannya masyarakat mudah untuk mengakses berbagai informasi mengenai politik. Gawai telah benar-benar mampu menjadi jembatan suara-suara publik yang sesungguhnya. Metag (2016 : 198) mengungkapkan bahwa komunikasi politik sangat penting untuk pembentukan pendapat tentang segala jenis masalah politik, proses komunikasi dan pembentukan pendapat tersebut berada di tingkat lokal maupun nasional.

Melalui gawai masyarakat memperoleh informasi tentang benda, orang dan tempat yang tidak dipahami secara langsung. Dunia ini terlalu luas untuk dijelajahi semuanya, dan gawai sebagai media komunikasi politik mampu menyampaikan

berbagai pesan tentang lingkungan sosial dan politik. Semua pesan yang mengandung muatan politik dapat membentuk atau mempertahankan citra politik dan pendapat umum. Meskipun penggunaan media politik dalam proses komunikasi politik dan bentuk-bentuk komunikasi politik seperti retorika propaganda, *public relations*, dan kampanye, tidak secara langsung menimbulkan perilaku tertentu namun cenderung mempengaruhi cara manusia mengorganisasikan citra politik. Hal itulah yang akan mempengaruhi cara manusia berpendapat dan berperilaku.

Babadac (2016 : 11-12) dalam penelitiannya tentang efek media baru terhadap budaya politik remaja menegaskan asumsi bahwa remaja mudah dipengaruhi oleh media serta oleh tekanan teman sebaya, ketika mereka tertarik dalam politik, dan menginginkan informasi lebih dalam setiap skandal dan kegiatan politik. Internet memberikan akses setiap remaja untuk jumlah informasi yang tak terbatas, sehingga remaja membutuhkan mekanisme penyaringan. Hal ini merupakan salah satu tugas yang paling menakutkan bagi kaum muda, karena dengan selera beragam dan kecenderungan untuk mencoba hal-hal baru, remaja dimanipulasi, bahkan mungkin ditargetkan.

Berdasarkan survei APJII (Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia) pada tahun 2017 tentang penetrasi pengguna internet di Indonesia terjadi peningkatan penggunaan internet di Indonesia. Hal itu dapat dilihat dalam Tabel 1.

Tabel 1. Penetrasi Pengguna Internet Indonesia

No	Pengguna Internet di Indonesia	
1	Jumlah	Presentase
2	143,26 dari 262 Juta Jiwa	54,68 %
3	Penetrasi Pengguna Internet Berdasarkan Usia	
4	Usia	Presentase
5	13 – 18 Tahun	75,50%
6	19 – 34 Tahun	74,23%
7	35 – 54 Tahun	44,06%
8	> 55 Tahun	15,72%
9	Perangkat Yang Dipakai Untuk Mengakses Internet	
10	Perangkat	Persentase
11	Komputer	4,49%
12	<i>Tablet /smartphone</i>	44, 16 %
13	Komputer dan <i>smartphone</i>	39,28 %
14	Lainnya	12, 07 %

Sumber : Hasil survei APJII tahun 2017.

Berdasarkan Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa dengan pesatnya perkembangan zaman seorang individu semakin sulit dipisahkan dari perangkat mobilya (gawai). Gawai dan internet telah menjadi kebutuhan pokok bagi manusia di era modern seperti sekarang. Tingginya angka penggunaan gawai dan internet pada usia remaja (13-18 tahun) yang mencapai 75,5%, dengan kecenderungan perangkat yang digunakan untuk mengakses internet adalah *smartphone* yang mencapai 44, 16%. Hal ini sangat penting untuk diperhatikan oleh berbagai pihak terutama orang tua dan sekolah. Penggunaan gawai harus mendapatkan pengawasan yang tepat agar memberikan efek yang positif. Teknologi informasi telah menjadi bagian yang sangat erat dalam kehidupan masyarakat Indonesia di era global seperti saat ini, dengan pemanfaatan yang benar teknologi informasi seperti gawai dapat membatu dan memberikan peran yang baik dalam proses pembelajaran di sekolah dan kemasyarakatan.

Penggunaan gawai oleh peserta didik memiliki dampak positif maupun negatif yang secara langsung berdampak pada persepsi dan orientasi peserta didik dalam pembentukan pengetahuannya. Dalam hal ini adalah pengetahuan mengenai politik dan budaya politik yang akan terbentuk. Dengan mudahnya seorang individu dapat mengakses sebuah informasi melalui perangkat gawai yang dimilikinya, yang dapat mempermudah seorang individu untuk menemukan informasi baru. Namun informasi yang didapat haruslah disikapi dengan baik karena tidak semua informasi sesuai dengan kenyataannya (*hoax*). Semakin banyak informasi *hoax* yang diperoleh oleh individu akan berdampak buruk pada persepsi dan orientasi yang mereka bentuk terhadap perpolitikan di Indonesia. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan MASTEL (Masyarakat Telematika Indonesia) tahun 2017 tentang penyebaran *hoax* (berita bohong) dapat dilihat bahwa terdapat permasalahan dalam penggunaan gawai yaitu penyebaran berita *hoax* yang sebagian besar berisi tentang berita politik. Hal ini dapat dilihat dalam Tabel 2.

Tabel 2. Penyebaran Berita *Hoax*

Jenis Hoax Yang Sering Diterima Responden		
NO	Jenis Hoax Yang Diterima	Persentase
1	Sosial Politik	91.80%
2	Sara	88.60%
3	Kesehatan	41.20%
4	Makanan/Minuman	32.60%
5	Penipuan Keuangan	24.50%
6	Iptek	23.70%
7	Berita Duka	18.80%
8	Candaan	17.60%
9	Bencana Alam	10.30%
10	Lalu Lintas	4%

Sumber : Hasil survei MASTEL tahun 2017 tentang *Hoax*.

Berdasarkan Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa penyebaran berita *hoax* tentang politik menjadi yang banyak tersebar dalam dunia digital yaitu sebesar 91,80%. Hal ini dapat mempengaruhi orientasi baik kognitif, afektif dan evaluatif politik siswa dalam proses sosialisasi politik digital. Dalam kasus informasi politik misalnya banyak berita yang tidak merujuk pada bukti – bukti dan fakta yang jelas mengenai mekanisme politik yang sedang berlangsung di Indonesia.

Berita *hoax* sangat meresahkan bagi masyarakat dan warga negara karena dapat berdampak langsung pada keterlibatan warga negara dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Untuk mengatasi hal ini dibutuhkan peningkatan literasi kewargaan, karena melalui peningkatan literasi kewargaan setiap individu dapat mengolah dan menganalisis setiap informasi yang didapatnya agar berguna untuk kepentingan bersama. Melalui literasi kewargaan diharapkan para remaja akan memiliki kemampuan untuk mengendalikan berita *hoax* yang tersebar begitu cepat melalui gawai dan media daring.

Literasi kewargaan merupakan seperangkat keterampilan dan pengetahuan untuk memahami dan mengatasi masalah – masalah dan isu – isu politik yang beredar, baik melalui media cetak atau media daring. Dengan kemampuan literasi kewargaan yang baik menjadi senjata yang ampuh untuk menanggulangi tersebarnya berita *hoax*. Literasi kewargaan akan membuat setiap individu memiliki kemampuan untuk menganalisis, mengamati, setiap isu – isu atau berita *hoax* termasuk isu politik dengan tepat tanpa mudah percaya dengan isu tersebut, hal ini didasarkan pada pengetahuan yang kompleks terhadap sistem perpolitikan yang mereka kuasai.

Namun penguasaan literasi kewargaan masih sangat kurang dimiliki oleh warga negara Indonesia, hal ini dapat dilihat dari angka penyebaran berita *hoax* yang masih sangat tinggi, kepekaan individu yang masing sangat rendah di media sosial, dan angka partisipasi serta keterlibatan individu yang masih rendah dalam politik. Hal tersebut menyebabkan perlu dilakukan peningkatan terhadap literasi kewargaan, Milner (2002: 3) menawarkan sejumlah langkah yang mungkin untuk meningkatkan literasi kewargaan seperti subsidi surat kabar, kegiatan informasi dari partai politik, dan dorongan dari penyiaran publik dan pendidikan kewarganegaraan. Pollack (2013: 235) juga mengungkapkan bahwa literasi kewarganegaraan yang kritis menganggap serius pendidikan kewarganegaraan. Literasi kewarganegaraan yang kritis memungkinkan kita untuk memikirkan kembali hubungan antara pengetahuan khusus dan pendidikan umum. Literasi kewargaan juga mampu memecah penghalang buatan antara apa yang terjadi di tempat kerja dan apa yang terjadi di lingkungan dan komunitas.

Pendidikan kewarganegaraan menjadi salah satu elemen yang sangat berperan dalam meningkatkan literasi kewargaan warga negara karena dalam pendidikan kewarganegaraan tercantum komponen-komponen pendidikan demokrasi seperti yang dikemukakan Dogenay (Print, 2013:32) tentang komponen pengetahuan politik, sistem hukum, konsep dasar prinsip dan institusi demokrasi, distribusi kekuasaan politik, konsep kewarganegaraan demokratis, hak dan kewajiban warga negara, dan HAM, yang menjadikan demokrasi menjadi salah satu kajian pokok dalam pendidikan kewarganegaraan dan merupakan salah satu komponen pengetahuan yang harus dikuasai oleh peserta didik sehingga harapan

dari pendidikan demokrasi dapat terlaksana dari proses pendidikan kewarganegaraan disekolah.

Melalui pendidikan kewarganegaraan seorang siswa juga menerima pendidikan politik secara langsung, menurut Brownhill and Patricia (1989 : 9) pendidikan politik merupakan suatu cara yang dilakukan negara untuk mempertahankan stabilitas politik, serta diharapkan dapat memberikan dasar yang baik agar proses demokrasi dapat berjalan maksimal. Selain melalui pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan politik secara formal, peningkatan literasi kewargaan juga dapat ditingkatkan melalui pemanfaatan media sebagai sarana sosialisasi dan komunikasi politik. Media sosial dan informasi yang diakses oleh peserta didik merupakan sebuah sarana dalam sosialisai politik untuk menumbuhkan sikap budaya politik yang baik dan meningkatkan literasi kewargaan.

Berkurangnya proses sosialisasi dengan tatap muka yang dilakukan oleh siswa karena terlalu asik dengan perangkat gawai yang digunakannya menyebabkan siswa tidak bisa melakukan diskusi atas informasi yang diterima melalui gawai yang dimilikinya. Hal ini menyebabkan siswa sering kali menerima pesan tersebut tanpa melaukan klarifikasi kebenaran terhada informasi atau isu politik yang diterima. Menurut Lang & Gladys (2009: 1001) dengan adanya media baru, seperti halnya media daring akan bisa merubah dan mempengaruhi budaya dan pola pikir dari masyarakat. Karena telah terjadi transformasi yang luas dari cara hidup masyarakat secara umum. Media daring telah menjadi kebutuhan manusia baik dalam waktu senggang ataupun saat mereka bekerja. Dengan pesatnya kemajuan

teknologi komunikasi teknologi, transformasi budaya seperti itu akan menjadi tidak terbayangkan.

Menurut Groshek (Martin, 2014 : 180), internet dan penggunaan ponsel membantu memfasilitasi perubahan demokratis dari waktu ke waktu di Mesir. Ditandai dengan pemanfaatan media daring untuk meningkatkan partisipasi politik. Internet menjadi komponen untuk melakukan perubahan karena ketidakstabilan sosial politik menuju kehidupan bernegara yang lebih demokratis. Walaupun komunikasi politik melalui gawai sangat berguna untuk mempercepat dan memperluas jangkauan informasi tetapi tetap dibutuhkan proses komunikasi dan sosialisasi politik secara langsung agar terjadi proses diskusi dan klarifikasi terhadap informasi politik yang diterima.

Kweit dan Kweit (1986: 91) menyatakan bahwa untuk melakukan penelitian dan melihat lebih jauh mengenai gambaran tindakan politik warga negara dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu sosialisasi politik dan budaya politik. Dalam hal ini sosialisasi politik dan budaya politik memiliki keterkaitan satu sama lain, karena sosialisai politik berfokus pada proses individu mencari pemahaman, pengetahuan dan pengalaman tentang politik, sedangkan budaya politik berfokus pada tindakan politik yang akan dilakukan melalui dukungan pemahaman, pengetahuan, dan pengalaman warga negara dari proses sosialisasi politik. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa budaya politik dibangun oleh sosialisasi politik, karena sosialisai politik berfokus pada proses untuk memahamkan warga negara tentang politik sedangkan budaya politik merupakan hasil prilaku yang terbentuk.

Pernyataan tersebut merupakan dasar untuk mengatakan bahwa sosialisasi politik memiliki andil dalam pembentukan budaya politik, melalui materi dan informasi yang diberikan kepada warga negara. Informasi yang positif mengenai sistem politik akan memberikan kepercayaan, kepekaan dan kesadaran warga negara untuk ikut berpartisipasi aktif dalam politik. Faktor-faktor lain yang berpengaruh dalam proses pembentukan budaya politik warga negara adalah tingkat pendidikan dan media masa sebagai sumber informasi, yang menjadi bagian dari agen – agen sosialisasi politik kepada warga negara.

Sosialisasi politik merupakan serangkaian proses atau tahapan bagi seorang warga negara untuk mengenali proses, struktur, mekanisme dan sistem politik. Bentuk pengetahuan yang telah didapatkan melalui serangkaian tahapan tersebut yang akan menentukan persepsi atau cara pandang seorang warga negara terhadap setiap gejala politik. Sosialisasi politik juga mencakup proses pemeriksaan mengenai, lingkungan politik, kultural, sosial dalam masyarakat yang digunakan untuk menilai permasalahan politik. Sosialisasi politik menjadi sebuah komponen yang sangat dibutuhkan untuk memberikan pemahaman dan pendidikan politik kepada masyarakat untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Jika sosialisasi politik berjalan dengan baik, maka partisipasi politik warga negara akan meningkat begitu juga sebaliknya.

Namun partisipasi politik pada pemilu di Indonesia terus terjadi penurunan dari masa ke masa. Pada pemilu legislatif yang dilaksanakan Indonesia pada tahun 1999, 2004, 2009, dan 2014) angka partisipasi politik mengalami penurunan yang drastis, pada pemilu yang dilaksanakan 1999 angka partisipasi pemilih mencapai

92,7%. Pada pemilu tahun 2004 angka partisipasi pemilih mengalami penurunan menjadi turun menjadi 84,06% dan pemilu berikutnya tahun 2009 kembali mengalami penurunan menjadi 70,99%. Dalam kurun waktu tiga priode pemilu angka partisipasi politik terus mengalami penurunan hingga 20%, meskipun pada pemilu tahun 2014 mengalami kenaikan menjadi 75,11%” (Djamaludin, 2017; Wikipedia, 2019). Berdasarkan data tersebut angka partisipasi pemilih selalu mengalami penurunan yang cukup signifikan, yang mengindikasikan bahwa masyarakat masih kurang memiliki pemahaman dan kesadaran politik yang baik.

Rendahnya angka partisipasi polititik masyarakat juga terjadi pada wilayah Lampung Timur, dengan angka partisipasi politik paling rendah di Provinsi Lampung pada Pilkada 2018. Jumlah partisipasi politik masyarakat lampung dapat dilihat dalam proses Pilkada. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Partisipasi Pemilih Pilkada Lampung 2018

No	Kabupaten	Partisipasi
1	Bandar Lampung	71.0 %,
2	Kota Metro	70.4 %
3	Lampung Barat	73.9 %
4	Lampung Selatan	70.5 %
5	Lampung Tengah	73.7 %
6	Lampung Timur	69.4 %
7	Lampung Utara	96.8 %
8	Mesuji	97.3 %
9	Pesawaran	73.6 %
10	Pesisir Barat	71.9 %
11	Pringsewu	74.0 %
12	Tanggamus	70.5 %
13	Tulang Bawang	69.6 %
14	Tulang Bawang Barat	78.9 %
15	Way Kanan	71.8 %

Sumber : Hasil Rekapitulasi Suara KPU pada Pilkada Provinsi Lampung 2018.

Berdasarkan Tabel 3 di atas wilayah Lampung Timur hanya memiliki angka partisipasi politik sebesar 69.4 %. Lampung Timur harus mendapatkan perhatian khusus dalam proses sosialisasi maupun pendidikan politik untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran politik masyarakatnya agar angka partisipasi politik pada pemilihan berikutnya mengalami peningkatan. Lampung Timur merupakan wilayah kabupaten pemekaran dari kabupaten lama yaitu Lampung Tengah yang diremismikan pada tanggal 27 april tahun 1999. Sebagai wilayah pemekaran di Provinsi Lampung, Lampung Timur terus melakukan pembenahan dan pembangunan di berbagai bidang. Untuk mendukung program itu juga dibuat wilayah administratif baru salah satunya Kecamatan Pasir Sakti yang berdiri pada tanggal 31 Mei tahun 2001. Melalui penambahan wilayah admisitratif diharapkan pembangunan akan semakin merata, terutama dalam bidang pendidikan. Pendidikan merupakan elemen pokok untuk meningkatkan pertumbuhan masyarakat di masa depan, salah satunya pendidikan di bidang politik dalam upaya peningkatan partisipasi politik yang masih rendah.

Pemilih pemula menjadi bagian yang sangat penting dalam proses pendidikan politik, karena masih sangat mudah untuk memberikan pemahaman atau doktrin–doktrin yang baik mengenai politik demi menciptakan budaya politik yang baik. Pemilih pemula sangat potensial untuk dijadikan agen masa depan sebagai pembaru untuk dalam dunia politik Indonesia. Dengan memberikan pemahaman yag baik dan benar mengenai politik, sistematika politik serta proses politik yang berlangsung di Indonesia, akan memberikan dorongan serta motivasi

bagi pemilih pemula untuk ikut membangun politik di Indonesia melalui sosialisasi politik dan pendidikan politik yang tepat dan efisien.

Semakin berkembangnya teknologi informasi, sosialisasi politik dapat dilakukan menggunakan media sosial yang dapat diakses melalui gawai, penggunaan media sosial (internet) dalam proses sosialisasi politik lebih praktis karena dapat dengan cepat menyebar ke masyarakat luas, sehingga proses penyebaran informasi tersebut harus dijaga keamanannya agar berita bohong tidak menyebar dengan mudah dan memberikan pengetahuan yang buruk serta berdampak pada pembentukan orientasi budaya politik terutama pada generasi muda. Klinger (2014 : 252) berpendapat bahwa *platform* media sosial beroperasi dengan logika yang berbeda dari media massa tradisional, dalam artikelnya Klinger juga telah menunjuk peran blog yang menonjol serta dapat memberikan informasi politik visibilitas cukup untuk memulai distribusi informasi. Informasi yang tersedia melalui jaringan internet juga memiliki umur panjang yang berguna untuk strategi komunikasi jangka panjang, serta informasi tentang aktor dan kegiatan politik tanpa batas.

Gawai telah menjadi sebuah alat yang efisien dalam proses sosialisai politik dalam membentuk pengetahuan politik masyarakat. Pemanfaatan dalam proses pendidikan politik menjadi sangat penting untuk memberikan informasi–informasi mengenai politik itu sendiri. Dalam proses pendidikan politik seharusnya terjadi keseimbangan antara konsep yang disampaikan guru di sekolah, serta pengetahuan yang diterima peserta didik di lingkungannya. Hal ini membutuhkan peran sekolah,

masyarakat, keluarga, maupun pemerintah untuk mengendalikan informasi yang tersebar dengan mudah melalui media sosial.

Berangkat dari berbagai permasalahan di atas serta rendahnya angka partisipasi politik di Kabupaten Lampung Timur, penulis terdorong melakukan kajian untuk melihat apakah penggunaan gawai sebagai media komunikasi politik mampu mempengaruhi pembentukan literasi kewargaan dan orientasi budaya politik di Kabupaten Lampung Timur, yang secara umum angka partisipasi politik di Lampung Timur yang paling rendah dari wilayah kabupaten lain di Lampung.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut.

1. Penggunaan gawai pada remaja yang berdampak negatif pada proses penyebaran berita *hoax*.
2. Kurangnya pengendalian informasi yang tersebar melalui internet sehingga menyebabkan berita *hoax* menjadi masif.
3. Penggunaan gawai sebagai media komunikasi politik yang menyebabkan berita *hoax* tentang politik menyebar dengan cepat.
4. Literasi kewargaan yang dimiliki warga negara Indonesia masih rendah.
5. Rendahnya sosialisasi dan interaksi tatap muka di antara para siswa.
6. Partisipasi politik yang rendah di Kabupaten Lampung Timur.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka penulis membatasi penelitian ini pada:

1. Penggunaan gawai sebagai media komunikasi politik yang menyebabkan berita *hoax* tentang politik menyebar dengan cepat.
2. Kurangnya literasi kewargaan yang dimiliki warga negara, khususnya di Kabupaten Lampung Timur.
3. Rendahnya partisipasi politik di Lampung Timur, menyebabkan tingkat budaya politik menurun.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut.

1. Adakah pengaruh penggunaan gawai sebagai media komunikasi politik terhadap literasi kewargaan siswa sekolah menengah atas negeri di Kabupaten Lampung Timur?
2. Adakah pengaruh gawai sebagai media komunikasi politik terhadap orientasi budaya politik siswa sekolah menengah atas negeri di Kabupaten Lampung Timur?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan menganalisis tentang:

1. Pengaruh penggunaan gawai sebagai media komunikasi politik terhadap literasi kewargaan siswa SMA Negeri.
2. Pengaruh penggunaan gawai sebagai media komunikasi politik terhadap pembentukan orientasi budaya politik siswa SMA Negeri.

F. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh manfaat sebagai berikut.

1. Manfaat Teoretis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam dunia pendidikan khususnya pendidikan politik dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- a. Bagi penulis, manfaat praktis yang diharapkan adalah agar penelitian ini dapat memberikan pemahaman serta pengetahuan selama mengikuti perkuliahan di Pascasarjana PPKn.

- b. Bagi siswa, manfaat praktis yang diharapkan adalah untuk membangun kesadaran siswa untuk menggunakan teknologi informasi lebih bijak dalam meningkatkan pengetahuannya tentang politik.
- c. Bagi guru, manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan guru tentang penggunaan teknologi informasi sebagai sumber dalam pembelajaran.
- d. Bagi orang tua siswa, manfaat praktis yang diharapkan adalah agar orang tua melakukan pengawasan mengenai dampak positif dan negatif penggunaan gawai .
- e. Bagi pemerintah, manfaat praktis dari penelitian ini adalah agar pemerintah memberikan pengawasan mengenai penyebaran berita *hoax* dan pemanfaatan teknologi informasi sebagai proses sosialisasi politik yang benar.